



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 318 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia;
  - b. bahwa dalam rangka memperlancar upaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, perlu dibentuk Klaster Penanggulangan Bencana di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Klaster Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Keputusan Kepala Badan ...

5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 173 Tahun 2014 tentang Klaster Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 016 Seri E Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0024);
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Klaster Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Klaster Kesehatan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang kesehatan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
  - b. Klaster Pencarian dan Penyelamatan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang pencarian dan penyelamatan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
  - c. Klaster Logistik bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang logistik pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
  - d. Klaster Pengungsian dan Perlindungan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang pengungsian dan perlindungan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
  - e. Klaster Pendidikan bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang pendidikan pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
  - f. Klaster Sarana dan Prasarana bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang sarana dan prasarana pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;

g. Klaster Ekonomi ...

- g. Klaster Ekonomi bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan bidang ekonomi pada saat terjadi bencana maupun situasi normal;
- h. Klaster Pemulihan Dini bertugas melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, monitoring serta evaluasi kegiatan pemulihan dini pada saat terjadi bencana maupun situasi normal.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Klaster sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 SEPTEMBER 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. DANREM 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
14. DANLANTAMAL VII di Kupang;
15. DANLANUD El Tari di Kupang;
16. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
17. Wali Kota Kupang di Kupang;
18. Para Bupati se – NTT masing-masing di tempat;
19. Koordinator Klaster Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 318 /KEP/HK/2023****TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2023****TENTANG KLASTER PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>NAMA KLASTER</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>	<b>KEANGGOTAAN</b>
1.	<b>KESEHATAN</b>	a. Pelayanan Kesehatan; b. Pengendalian Penyakit; c. Penyehatan Lingkungan; d. Penyiapan Air Bersih dan Sanitasi yang berkualitas; e. Pelayanan Kesehatan Gizi; f. Pengelolaan Obat Bencana; g. Penyiapan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana; h. Penanganan Kesehatan Jiwa; i. Penatalaksanaan Korban Meninggal; dan j. Pengelolaan Informasi Bidang Kesehatan.	Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT  Anggota : 1. Ketua Sinode GMIT 2. Ketua MUI Provinsi NTT 3. Ketua PHDI Provinsi NTT 4. Ketua WALUBI Provinsi NTT 5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT 6. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT 8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT 9. Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang 10. Karumkit TNI AD Wira Sakti Kupang 11. Kadiskes TNI AL Lantamal VII Kupang 12. Karumkit Bhayangkara Polda NTT 13. Tim DVI Polda NTT 14. Ketua Forum PRF Provinsi NTT 15. Ketua PMI Provinsi NTT 16. Ketua IDI Provinsi NTT 17. Ketua IAI Provinsi NTT 18. Ketua IBI Provinsi NTT 19. Ketua PPNI Provinsi NTT 20. Ketua HAKLI Provinsi NTT 21. Ketua PPDI Cabang Kupang 22. Ketua MDMC NTT 23. Ketua HIMPSI NTT 24. Koordinator Dompot Dhuafa NTT 25. Manager WFP Project Manager NTT 26. Manager ADRA Project Manager NTT

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
2.	<b>PENCARIAN DAN PENYELAMATAN</b>	<p>a. Mengarahkan, mengoordinir serta mengendalikan saran dan personal dalam pelaksanaan operasi pencarian, penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana secara cepat, efisien dan terpadu; dan</p> <p>b. Pengelolaan sistrem informasi dibidang pencarian dan penyelamatan.</p>	<p>Koordinator : Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Kupang</p> <p>Anggota : 1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT  3. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT  4. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT  5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT  6. Kepala Satpol PP Provinsi NTT  7. Karo Ops Polda NTT  8. Kasi Ops Korem 161/WS Kupang  9. Kadis Ops Lantamal VII Kupang  10. Kadis Ops Lanud El Tari Kupang  11. Dansat Brimobda Polda NTT  12. Dir. Polair Polda NTT  13. Koordinator Tim DVI Polda NTT  14. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Kupang  15. Ketua Forum PRB Provinsi NTT  16. Manager PT. Pertamina (Persero) Cabang Kupang  17. Koordinator TAGANA Provinsi NTT</p>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
3.	<b>LOGISTIK</b>	a. Pengadaan barang : sandang, permakanan, peralatan; b. Bea cukai (untuk barang yang dibawa dari luar negeri/di import); c. Penyimpanan / pergudangan; d. Distribusi logistik; e. Keamanan logistic; dan f. Pengelolaan informasi di bidang logistik.	Koordinator : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perhubungan Prov. NTT</li> <li>2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Dinas Sosial Prov. NTT</li> <li>4. Ketua KADIN Provinsi NTT</li> <li>5. Karo Log Polda NTT</li> <li>6. Kasi Log Korem 161/WS Kupang</li> <li>7. As. Log Lantamal VII Kupang</li> <li>8. Kadislog Lanud El Tari Kupang</li> <li>9. Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT</li> <li>10. Kabulog Divisi Regional NTT</li> <li>11. Dirut PT. BPD NTT</li> <li>12. Kepala BRSPDSRW Efata Kupang</li> <li>13. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Prov. NTT</li> <li>14. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. NTT</li> <li>15. Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Prov. NTT</li> <li>16. WFP Project Manager NTT</li> <li>17. Executive General Manager PT. Pos Indonesia</li> <li>18. GM PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang;</li> <li>19. Direktur PT. Pelindo III Cabang Tenau Kupang</li> <li>20. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Nusa Tenggara Timur</li> <li>21. Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia NTT</li> <li>22. Ketua Ekspedisi Muatan Pesawat Udara NTT</li> <li>23. Ketua Kadin Provinsi NTT</li> <li>24. Ketua DPP Apindo NTT</li> <li>25. Manager Program Siap Siaga Provinsi NTT</li> <li>26. Ketua Forum PRB Provinsi NTT</li> </ol>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
4.	<b>PENGUNGSIAN DAN PERLINDUNGAN</b>	a. Penyiapan Dapur Umum; b. Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, tempat pengungsian dan keamanan; c. Manajemen pengungsian dan penyiapan hunian sementara; d. Perlindungan kelompok rentan; dan e. Pengelolaan informasi di bidang pengungsian dan perlindungan.	Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT</li> <li>2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT</li> <li>4. Ketua Sinode GMIT</li> <li>5. Ketua MUI Provinsi NTT</li> <li>6. Ketua PHDI Provinsi NTT</li> <li>7. Ketua WALUBI Provinsi NTT</li> <li>8. Dit Intelkam Polda NTT</li> <li>9. Kabagdal Ops Polda NTT</li> <li>10. As. Intel Lantamal VII Kupang</li> <li>11. Kadis Ops Lantaman VII Kupang</li> <li>12. As Intel Lanud El Tari Kupang</li> <li>13. Kadis Ops Lanud El Tari Kupang</li> <li>14. Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Kementerian PUPR RI</li> <li>15. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT</li> <li>16. Kabid Perumahan pada Dinas PUPR Prov.NTT</li> <li>17. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT</li> <li>18. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur</li> <li>19. Koordinator TAGANA Provinsi NTT</li> <li>20. Manager WFP Project Manager NTT</li> <li>21. Manager ADRA Project Manager NTT</li> <li>22. Manager Program Siap Siaga Provinsi NTT</li> <li>23. Ketua PKBI Daerah NTT</li> </ol>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
5.	<b>PENDIDIKAN</b>	a. Pelayanan belajar mengajar formal dan informal; b. Penyiapan sekolah darurat; c. Bimbingan dan penyuluhan bagi pengungsi dan anak dewasa; d. Kerohanian; dan e. Pengelolaan informasi di bidang Pendidikan.	Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT</li> <li>2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi NTT</li> <li>4. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT</li> <li>5. Kepala Dinas P3A Provinsi NTT</li> <li>6. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT</li> <li>7. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT</li> <li>8. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT</li> <li>9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT</li> <li>10. Ketua Sinode GMIT</li> <li>11. Ketua MUI Provinsi NTT</li> <li>12. Ketua PHDI Provinsi NTT</li> <li>13. Ketua WALUBI Provinsi NTT</li> <li>14. Ketua PKBI Provinsi NTT</li> <li>15. Ketua Unit Layanan Disabilitas Provinsi NTT</li> <li>16. Kepala BRSPDSRW Efata Kupang</li> <li>17. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Provinsi NTT</li> </ol>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
6.	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	a. Pembersihan puing-puing / <i>debris clearance</i> ; b. Penyediaan alat transportasi, telekomunikasi dan energy; c. Penyediaan hunian tetap (HunTap); d. Penyediaan Air dan Sanitasi; dan e. Pengelolaan Informasi di bidang sarana dan prasarana.	Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT</li> <li>2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT</li> <li>4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT</li> <li>5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT</li> <li>6. Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT</li> <li>7. Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT</li> <li>8. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT</li> <li>9. Dandezibang I/IX TNI AD NTT</li> <li>10. Karo. Sarpras Polda NTT</li> <li>11. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Kupang</li> <li>12. Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Kementerian PUPR RI</li> <li>13. Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah X NTT Kementerian PUPR RI</li> <li>14. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT</li> <li>15. GM. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wil. NTT</li> <li>16. GM. PT. Telekomunikasi Indonesia Kupang</li> <li>17. Account Manager Telkomsel NTT</li> <li>18. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT</li> </ol>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
7.	<b>EKONOMI</b>	a. Pengelolaan sektor pertambangan dan galian; dan b. Listrik, Gas, Air Minum, Industri Pengolah, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Jasa dan Pertanian.	Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT</li> <li>2. Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT</li> <li>4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT</li> <li>5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT</li> <li>7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT</li> <li>8. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT</li> <li>9. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT</li> <li>10. Ketua Kadin NTT</li> <li>11. Ketua Gapensi NTT</li> <li>12. Ketua DPP Apindo NTT</li> <li>13. GM. PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTT</li> <li>14. GM. PT. Telekomunikasi Indonesia Kupang</li> <li>15. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT</li> </ol>

NO.	NAMA KLASTER	URAIAN TUGAS	KEANGGOTAAN
8.	<b>PEMULIHAN DINI / GOVERNMENT</b>	a. Penguatan kapasitas pemerintah pusat/daerah untuk koordinasi; b. Revitalisasi fungsi pemerintah desa/kecamatan/kabupaten/provinsi; c. Pemulihan layanan publik, sarana pendukung pemerintahan; d. Penguatan kapasitas perencanaan dan pendanaan; dan e. Pengelolaan informasi dibidang pemulihan dini.	Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT  Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT</li> <li>2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi NTT</li> <li>3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT</li> <li>4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT</li> <li>5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT</li> <li>6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT</li> <li>7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT</li> <li>8. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT</li> <li>9. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT</li> <li>10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT</li> <li>11. Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT</li> <li>12. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah NTT</li> <li>13. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Kupang</li> <li>14. GM. PT. Telekomunikasi Indonesia Kupang</li> <li>15. Account Manager Telkomsel NTT</li> <li>16. Kepala Stasiun LPP RRI Kupang</li> <li>17. Kepala LPP TVRI Stasiun NTT</li> <li>18. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPBD Provinsi NTT</li> </ol>

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**